

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Andrianto, Nico. 2007. Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. Malang : Bayumedia Publishing.
- Chourmain, Imam. 2008. Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta : Al-Haramain Publishing House.
- Creswell, John W. 2010. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djojosoekarto, Agung dkk. 2008. *E-Procurement* di Indonesia. Jakarta : LPSE Nasional.
- Jogiyanto. 2003. Seminar Nasional *E-Government* : Kesuksesan Penerapan *E-Government*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta : Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.
- Miles, B Matthew & A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neef, D. 2001. E-Procurement : from Strategy to Implementaton. Upper Saddle River, NJ : Financial Times Prentice Hall Books.

- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Siregar, Khalid. 2015. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras di Kabupaten Simeulue. Jakarta : Tesis UT.
- Subarsono, A.G. 2009. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Alfabeta.
- Sutiono & Wibawa, D.A. 2014. Analisis Perbedaan Sistem Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementerian Keuangan Sebelum dan Setelah Penerapan *E-Procurement*. Jakarta : Kajian Akademis BPPK.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wardiyanto, Bintoro. 2012. Kebijakan *E-Procurement*. Surabaya : PT. Revka Petra Media.
- Wening, Dyah. 2015. Evaluasi Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di LKPP. Yogyakarta : Tesis UGM.
- Wibawa, S; Purbokusumo, Y; Pramusinto, A. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta :
PT. Buku Seru.

JURNAL :

Bruno, Giuseppe, et.al. 2005. "Analysis of Public E-Procurement Web Site
Accessibility". Journal of Public Procurement. V 5.

Croom, Simon R dan Brandon-Jones, Alistair. 2005. "Key Issues In E-
Procurement : Procurement Implementation and Operation in the Public
Sector". Journal Of Public Procurement. V 5.

Mukhopadhyay, Bappaditya. 2011. Evaluating Public Procurement. SAGE
Publication.

Novitaningrum, Badzalina. 2014. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement (Best Practice*
di Pemerintah Kota Surabaya)". Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
Volume 2, Nomor 1. ISSN 2303 - 341X.

OECD. 2007. "*Integrity on Public Procurement, Good Practices from A to Z*".
Paris. Tersedia pada : Piga, G. "*A Fighting Chance Against Corruption in*
Public Procurement?" pada Rose-Ackerman, S. and Soreide, T. (eds.) 2011.
International Handbook on the Economics of Corruption, Volume 2,
Edward Elgar, Cheltenham.

Setyadiharja, Rendra dan Nurmandi. 2014. Implementasi Sistem E-Procurement
Pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan
Kebijkana Publik Vol.1 No.2.

Udoyono, Kodar. *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.3 No.1 Bulan Februari 2012.

PERATURAN :

Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SUMBER LAINNYA :

Data ULP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2017.

Data PPK P2SPAB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2017.

<https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>, tanggal publikasi 10

Desember 2015, tanggal akses 20 Mei 2017 pukul 22.50 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/17234861/negara.rugi.hampir.rp.1.triliun.dari.korupsi.pengadaan.barang.dan.jasa>., tanggal publikasi 27 Juni

2016, tanggal akses 20 Mei 2017 pukul 22.08 WIB.

<http://ppm-manajemen.ac.id/blog/artikel-manajemen-10/post/e-procurement-perhemat-anggaran-353>, tanggal akses 21 Mei 2017 pukul 01.39 WIB.

<http://pusdiklat.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/7%20proyek%20perubahan>

[/Laporan%20Proyek%20Perubahan_Mustika%20Rosalina%20Putri.pdf](#),

tanggal akses 21 Mei 2017 pukul 02.13 WIB.

<https://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/perkembangan-e-procurement-di-indonesia/>,

tanggal publikasi 17 Maret 2016, diakses tanggal 21 Mei 2017 pukul 17.05

WIB.